



## ANALISIS PENGARUH SENSITIVITAS POLITIK TERHADAP BIAYA POLITIK (Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Ika Pratiwi, Aditya Septiani<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The aim of this research is to examine the influence of political sensitivity that is reviewed with the high visibility and the importance of contracts to the firm. Firm size, profitability, leverage, capital intensity, inventory intensity used as control variable. The population in this study consists of all listed firm in Indonesia Stock Exchange in year 2013. Sampling method used is purposive sampling. Company criteria used is listed company in BEI 2013 for all industrial sectors except the agriculture sector and the financial sector. A company that only sampled must have a government contract in 2013 and value of the income before tax was positive in 2013. Total data of this study is 90 data. There are not samples that include outlier should be excluded from samples of observation. Simple regression used to be analysis technique. The empirical result of this study show that political sensitivity review by the high visibility have positively significant influenced on political cost. While the political sensitivity that is reviewed by the importance of the contract did not show significant results.*

**Keyword :** *political costs, providers of goods and services, sensitivity, taxes.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa melalui Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakat. Atas transaksi bisnis tersebut perusahaan akan terlibat dalam suatu proses politik dimana proses politik dipandang sebagai sebuah persaingan dalam transfer kekayaan pemerintah. Selama proses politik tersebut penyedia barang/jasa akan diawasi seluruh tindakannya oleh pemerintah karena kegiatan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa tersebut menyangkut kepentingan masyarakat secara umum (Mills, et al., 2012). Oleh karena itu, penyedia barang/jasa akan memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan transfer kekayaan positif berupa subsidi dari pemerintah dan kontrak yang dimiliki oleh perusahaan atau mengurangi transfer kekayaan negatif seperti pembayaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan biaya politik berupa beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan agar tidak memberatkan perusahaan.

Penyedia barang/jasa akan sensitif dalam membayar biaya politiknya sesuai dengan proporsi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengawasan dari pemerintah yang apabila perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak maka pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut, dan jika dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa perusahaan telah melakukan kecurangan maupun ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka hal tersebut akan mengakibatkan pemerintah menghapus subsidi yang diberikan kepada perusahaan atau kerugian lainnya seperti pembatalan kontrak dan pemberian sanksi pajak kepada perusahaan yang melanggar.

---

<sup>1</sup> Corresponding author



Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis memilih sensitivitas politik yang ditinjau dari visibilitas tinggi dan pentingnya kontrak sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Sensitivitas politik dipilih karena perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang cukup besar akan lebih mendapat pengawasan dari pemerintah maupun media dan apabila proporsi pendapatan yang diperoleh perusahaan cukup besar atas kontrak tersebut, maka perusahaan akan berusaha mempertahankan kontrak sehingga mendorong perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang menjadi kewajibannya yaitu diantaranya beban pajak agar tidak kehilangan pendapatan dari kontrak tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan, karena dengan melihat pengaruh dari sensitivitas politik terhadap biaya politik suatu perusahaan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengawasan politik dari pemerintah maupun media terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Untuk mengetahui tingkat biaya politik yang dibayarkan oleh penyedia barang/jasa tidak terlepas dari teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik. Pada hipotesis biaya politik menjelaskan tentang fenomena bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan pangsa pasar dan laba yang sangat besar akan mendapat perhatian publik yang besar pula. Perusahaan seperti ini biasanya dituntut memenuhi standar kinerja operasi dan kinerja lingkungan yang tinggi. Perusahaan seperti ini rentan terhadap kenaikan pajak dan pungutan lain (Ghofar, 2003) dan hipotesis ini mengansumsikan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan berbagai metode akuntansi sehingga perusahaan tidak menarik perhatian pemerintah ataupun media yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industri.

Peran hipotesis biaya politik bagi biaya politik adalah, perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang besar akan lebih diawasi oleh pemerintah maupun media baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dari pemerintah dilakukan oleh SKK Migas, KPPU dan lembaga lainnya. Adanya pengawasan tersebut sangat mempengaruhi perilaku penyedia barang/jasa. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar atas besarnya nilai kontrak dari pemerintah serta apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan cukup besar dari nilai kontrak tersebut maka perusahaan akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini membayar pajak sesuai ketentuan agar tidak kehilangan kontrak dari pemerintah yang merupakan sumber pendapatannya.

### **Pengaruh Sensitivitas Politik terhadap Biaya Politik**

Sensitivitas politik adalah pengaruh gabungan dari memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan untuk memotivasi perubahan perilaku. Sensitivitas politik dalam penelitian ini ditinjau dari visibilitas tinggi (VisTing) dan ditinjau dari pentingnya kontrak (PenKon).

Transaksi bisnis yang dilakukan penyedia barang/jasa dengan pemerintah menjadikan penyedia barang/jasa akan terlibat dalam suatu proses politik dimana proses politik dipandang sebagai sebuah persaingan dalam transfer kekayaan (Watt dan Zimmerman 1986 dalam Mills, *et al.*, 2012). Transfer antara perusahaan dan pemerintah dapat bersifat negatif (misalnya, membayar pajak) dan juga dapat bersifat positif (misalnya, menerima subsidi atau penerimaan dari pemerintah lainnya). Selama proses politik tersebut penyedia barang/jasa akan memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah sebagai upaya dalam mendapatkan atau mempertahankan transfer kekayaan positif atau mengurangi transfer kekayaan negatif. Oleh karena itu, perusahaan akan patuh terhadap pengawasan dari pemerintah dan bersedia menanggung biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses politik tersebut diantaranya yaitu beban pajak (Mills *et al.*, 2010). Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan biaya politik berupa beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan agar tidak memberatkan perusahaan (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014).

Perusahaan yang memiliki nilai kontrak besar (VisTing) menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/*general public*) sehingga perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan besaran yang dikenakan untuk menghindari pengawasan berlebih dari pemerintah atau mengurangi pengawasan dari pemerintah yang dapat mengakibatkan adanya pajak tambahan yang dikenakan kepada perusahaan maupun tindakan lain pemerintah melalui peraturan yang ada yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan terutama penghentian kontrak apabila perusahaan tidak mengeluarkan biaya politiknya. Perilaku penyedia barang/jasa akan sangat dipengaruhi dengan adanya pengawasan baik langsung maupun tidak langsung.

Besarnya proporsi pendapatan yang diperoleh dari kontrak pemerintah dibandingkan dengan seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan (PenKon) membuat pendapatan kontrak dari pemerintah tersebut menjadi sangat penting bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian Mills, *et al* (2012), suatu pendapatan dari kontrak pemerintah dapat dikatakan penting apabila persentase pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kontrak pemerintah dibandingkan dengan seluruh pendapatan yang diperoleh sebesar lebih dari 15 % (persen). Perusahaan penyedia barang/jasa akan berusaha mempertahankan kontrak tersebut dikarenakan apabila perusahaan kehilangan pendapatan dari kontrak pemerintah karena adanya pembatalan kontrak yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya yaitu salah satunya pembayaran pajak, pembatalan kontrak tersebut akan mengganggu keberlangsungan usaha dan sangat merugikan perusahaan karena perusahaan akan kehilangan sebagian besar pendapatannya. Oleh karena itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya politik supaya perusahaan tidak kehilangan pendapatan yang berasal dari kontrak dengan pemerintah (Mills *et al.*, 2012).

Adanya nilai kontrak yang besar yang diperoleh oleh perusahaan dan pentingnya pendapatan dari kontrak pemerintah bagi perusahaan mendorong sensitivitas perusahaan dalam pengeluaran biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu beban pajak. Oleh karena itu perusahaan bersedia menanggung biaya politik yang merupakan kewajibannya berupa pembayaran pajak yang lebih besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dibanding perusahaan yang lain. Semakin tinggi sensitivitas politik suatu perusahaan maka semakin besar biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Hal ini sesuai dengan Hipotesis biaya politik, dimana perusahaan-perusahaan besar dengan pangsa pasar dan laba yang sangat besar akan mendapat perhatian publik yang besar dan perusahaan akan cenderung untuk menggunakan berbagai metode akuntansi yang lebih konservatif dengan melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga perusahaan tidak menarik perhatian pemerintah ataupun media yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industry. Hasil penelitian Mills *et al.* (2012) menunjukkan bahwa sensitivitas politik mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap biaya politik. Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

*H : Sensitivitas politik berpengaruh positif terhadap biaya politik*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya Politik pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sensitivitas Politik pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (*SIZE*), Profitabilitas (*ROA*), *Leverage*, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013. Biaya politik adalah pembayaran pajak kepada pemerintah yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Biaya politik diukur dengan rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak tahun 2013 (Mills, *et al.*, 2012). Sensitivitas politik merupakan pengaruh gabungan dari memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan untuk

memotivasi perubahan perilaku. Sensitivitas Politik diukur dengan visibilitas tinggi (VisTing) yaitu merupakan variabel dummy, kode 1 jika jumlah visibilitas kontrak (Nilai kontrak dari pemerintah, dalam jutaan rupiah) masuk 10 % tertinggi dari visibilitas kontrak semua perusahaan tahun tersebut, kode 0 sebaliknya, dan ditinjau dari pentingnya kontrak (PenKon) yaitu rasio nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan terhadap total pendapatan perusahaan (Mills, et al.,2012). Ukuran perusahaan (SIZE) merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun, diukur dengan logaritma natural dari total aset (Mills, et al.,2012). Profitabilitas perusahaan (ROA) merupakan ukuran seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan, diukur dengan rasio laba sebelum pajak terhadap total aset (Mills, et al.,2012). *Leverage* (LEV) merupakan perbandingan antara seluruh hutang perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan, diukur dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas (Mills, et al.,2012). Intensitas modal (IntMod) merupakan rasio total aset tidak lancar terhadap total aset perusahaan (Mills, et al.,2012), dan Intensitas persediaan (IntPersed) merupakan rasio persediaan terhadap total aset perusahaan (Mills, et al.,2012).

### Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan dengan data tahun 2013. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode *purposive sampling* adalah pemilihan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI tahun 2013 untuk seluruh sektor industri kecuali sektor pertanian dan sektor keuangan.
2. Perusahaan yang memiliki kontrak dari pemerintah tahun 2013.
3. Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak yang positif tahun 2013.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 90 perusahaan

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1\ i,t} + \beta_k X_{k\ i,t} + e$$

Keterangan :

$Y_{i,t}$  : Biaya politik perusahaan i yang terjadi pada tahun t

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien arah regresi variabel sensitivitas politik

$X_{1\ i,t}$  : Sensitivitas politik perusahaan i yang terjadi pada tahun t

$\beta_k$  : Koefisien arah regresi variabel kontrol

$X_{k\ i,t}$  : Variabel kontrol perusahaan i yang terjadi pada tahun t

$e$  : Standar error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 yakni sebesar 489 perusahaan. Sampel diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan sampel sebanyak 90 perusahaan, adapun penentuan sampel dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Proses Purposive Sampling Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
Perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013	489
Perusahaan yang termasuk dalam sektor pertanian, dan keuangan.	(50)
Perusahaan yang tidak memiliki kontrak dari pemerintah tahun 2013 dan nilai laba sebelum pajak yang negatif tahun 2013	(349)
Total Sampel	90

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah sampel sebesar 90 penyedia barang/jasa yang terdapat di BEI. 90 perusahaan yang terdiri dari 15 perusahaan sektor pertambangan, 9 perusahaan sektor industri dasar dan kimia, 1 perusahaan sektor aneka ragam, 8 perusahaan sektor aneka industri, 2 perusahaan sektor industri barang konsumsi, 15 perusahaan sektor properti dan real estate, 22 perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, dan 19 perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Visibilitas Tinggi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	81	90,0	90,0	90,0
1	9	10,0	10,0	100,0
Total	90	100,0	100,0	

Sumber: data yang diolah

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif Pentingnya Kontrak**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Biaya Politik	90	,0598	,5726	,258539	,1027894
PenKon	90	,0002	,4766	,122772	,1147811
SIZE	90	,2203	32,4827	28,250452	3,4940003
ROA	90	,0024	,2702	,082079	,0632663
LEV	90	,0199	23,7171	2,272788	4,0167095
IntMod	90	,0009	,9934	,496327	,2615791
IntPersed	90	,0000	2,1981	,135040	,2535928
Valid N (listwise)	90				

Sumber: data yang diolah

#### Keterangan :

Biaya Politik : Pembayaran pajak kepada pemerintah yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku.

VisTing : Variabel dummy, 1 jika visibilitas kontrak (nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan, dalam jutaan rupiah) masuk 10 % tertinggi dari visibilitas kontrak semua perusahaan tahun tersebut, dan 0 sebaliknya.

PenKon : Rasio nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan terhadap total pendapatan perusahaan.

SIZE : Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan nilai logaritma dari nilai buku atas total aset.

- ROA : Ukuran seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan.
- LEV : Perbandingan antara seluruh hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.
- IntMod : Rasio total aset tetap terhadap total aset.
- IntPersed : Rasio persediaan terhadap total aset.

Penjelasan deskripsi statistik variabel berdasarkan informasi tabel 2, jumlah sampel adalah 90 (N), dapat diketahui bahwa ada 9 sampel yang masuk kategori 1 atau sebesar 10 % dari keseluruhan jumlah sampel yang masuk dalam kelompok visibilitas tinggi, sedangkan 90 % sisanya atau sebanyak 81 sampel masuk kategori 0. Berdasarkan pada tabel 3, nilai terkecil biaya politik adalah 0,0598 merupakan nilai dari perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk dan nilai terbesarnya adalah 0,5726 merupakan nilai dari perusahaan Hutama Karya (Persero) Tbk. Nilai rata-ratanya atau mean adalah 0,258539 dengan deviasi standar 0,1027894. Nilai terkecil pentingnya kontrak adalah 0,0002 merupakan nilai dari perusahaan Vale Indonesia Tbk dan nilai terbesarnya adalah 0,4766 merupakan nilai dari perusahaan Elnusa Tbk. Nilai rata-rata atau mean adalah 0,122772 dengan deviasi standar 0,1147811. Nilai terkecil ukuran perusahaan (*Size*) adalah 0,2203 merupakan nilai dari perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk dan nilai tertinggi adalah 32,4827 merupakan nilai dari perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nilai rata-rata adalah 28,250452 dengan deviasi standar 3,4940003. Nilai terkecil ROA adalah 0,0024 merupakan nilai dari perusahaan Vale Indonesia Tbk dan nilai tertinggi adalah 0,2702 merupakan nilai dari perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Nilai rata-rata adalah 0,082079 dengan deviasi standar 0,0632663. Nilai terkecil *Leverage* adalah 0,0199 merupakan nilai dari perusahaan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk dan nilai tertinggi adalah 23,7171 merupakan nilai dari perusahaan Berau Coal Energy Tbk Nilai rata-rata adalah 2,272788 dengan deviasi standar 4,0167095. Nilai terkecil Intensitas modal adalah 0,0009 merupakan nilai dari perusahaan Trans Power Marine Tbk dan nilai tertingginya adalah 0,9934 merupakan nilai dari perusahaan Bumi Resources Minerals Tbk. Nilai rata-rata adalah 0,496327 dengan deviasi standar adalah 0,2615791. Nilai terkecil Intensitas Persediaan adalah merupakan nilai dari perusahaan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, dengan nilai tertingginya adalah 2,1981 merupakan nilai dari perusahaan Trans Power Marine Tbk. Nilai rata-ratanya adalah 0,135040 dengan deviasi standar adalah 0,2535928.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas berdasarkan analisis statistik dan grafik menunjukkan titik-titik plot garis menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Grafik batang membentuk lonceng. Nilai kolmogrov-smirnov untuk sensitivitas politik yang ditinjau dengan visibilitas tinggi adalah 0,818 dengan probabilitas 0,515 dan besaran nilai kolmogrov-smirnov untuk sensitivitas politik yang ditinjau dengan pentingnya kontrak adalah 0,592 dengan probabilitas 0,875 yang jauh di atas 0,05. Data residual terdistribusi normal sehingga model regresi linear sederhana tersebut layak dipakai untuk menganalisis pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada table 4 dapat dilihat bahwa VisTing, ROA, IntMod dan Int Persed memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5%. Sedangkan variabel PenKon, SIZE dan LEV tidak menunjukkan hasil yang signifikan dimana sensitivitas politik yang ditinjau dengan pentingnya kontrak diperoleh nilai  $t = 1,106$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,272. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel sensitivitas yang ditinjau dengan pentingnya kontrak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya politik pada taraf 5%. Hipotesis menyatakan bahwa sensitivitas politik berpengaruh positif terhadap biaya politik. Pada tabel 4, nilai signifikansi untuk VisTing sebesar 0,005 atau dibawah 0,05 dan arah koefisien yang positif yaitu 2,854, hal ini menunjukkan bahwa variabel sensitivitas politik yang ditinjau dengan visibilitas tinggi berpengaruh positif terhadap biaya politik dan signifikan pada taraf 0,05, maka hipotesis diterima dengan variabel sensitivitas yang ditinjau dengan visibilitas tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sensitivitas politik maka akan semakin tinggi biaya politik. Penelitian ini mendukung

penelitian dari Mills, *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa sensitivitas politik yang ditinjau dari visibilitas tinggi berpengaruh positif terhadap biaya politik.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	t	Nilai Signifikansi ( $\alpha = 5\%$ )
VisTing	2,854	,005 *
PenKon	1,106	,272
SIZE	1,362	,177
ROA	-3,112	,003 *
LEV	-,429	,669
IntMod	-2,731	,008 *
IntPersed	-2,613	,011 *

Keterangan: \*) Signifikan

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul yang kemudian di olah, mengenai pengaruh sensitivitas politik yang ditinjau dari visibilitas kontrak dan pentingnya kontrak terhadap biaya politik yang menjadi objek penelitian, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian ini, antara lain :

Sensitivitas politik yang ditinjau dengan visibilitas tinggi (VisTing) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya politik. Hal ini dapat dilihat dari uji signifikansi parsial dimana nilai t positif sebesar 2,854 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang berada dibawah 0,05. Nilai t positif berarti bahwa sensitivitas politik yang ditinjau dari *visibilitas tinggi* meningkat, maka biaya politik juga ikut meningkat. Sedangkan sensitivitas politik yang ditinjau dengan pentingnya kontrak tidak berpengaruh terhadap biaya politik. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa sensitivitas yang ditinjau dengan pentingnya kontrak memiliki pengaruh positif terhadap biaya politik. Hal ini mungkin terjadi karena hanya sedikit sampel dari keseluruhan sampel yang memiliki kontrak yang penting yaitu 43,3 persen dari total sampel atau hanya 39 sampel dari total sampel yaitu 90 data yang mendapatkan persentase atas pendapatan dari kontrak dibandingkan dengan total pendapatan diatas 20 persen. sehingga hal tersebut tidak mampu mempengaruhi penyedia barang/jasa untuk lebih sensitif dalam mengeluarkan biaya politik. Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun masih banyak keterbatasan seperti berikut : *pertama* keterbatasan dalam mengambil jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel, penelitian ini hanya menggunakan 90 perusahaan dari 489 penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga memungkinkan ketidakakuratan hasil. *Kedua* keterbatasan dalam menggunakan periode pengamatan sehingga memungkinkan tidak diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi, dan *ketiga* keterbatasan dalam nilai *adjusted R square* pada penelitian ini hanya sebesar 0,224 yang berarti rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Adapun saran-saran yang peneliti ajukan berdasarkan keterbatasan, untuk dapat dijadikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bagi penelitian selanjutnya adalah *pertama* untuk menambahkan jumlah variabel yang di teliti, *kedua* untuk menambahkan jumlah periode pengamatan sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi, dan *ketiga* untuk menambahkan jumlah sampel yang diteliti karena mungkin dengan penambahan jumlah sampel penelitian dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

**REFERENSI**

- Daftar Perusahaan yang Tercatat di BEI 2013, diakses pada 03 Oktober 2014 dari <http://www.sahamok.com>.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak". h. 143-161. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Fajarini SW, Indah. 2010. "Pengaruh Biaya Politis, *Leverage* dan ROE terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Ghofar, Abdul. 2003. "Review Hipotesa Biaya Politik Dan Biaya Kontrak Serta Implikasinya pada Laporan Keuangan dan Pembuatan Standar". TEMA, Vol 4, No.1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. "Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur", diakses pada 3 September 2014 dari [http://www.Komisi Pengawas Persaingan Usaha.Kerjasama.htm](http://www.KomisiPengawasPersainganUsaha.Kerjasama.htm).
- Mills, Lillian F, Sarah E. Nutter, dan Casey M. Schwab. 2010. "Do Federal Contractor Suffer Tax-Related Political Cost?". *American Accounting Review*, pp. 1-40.
- Mills, Lillian F, Sarah E. Nutter, dan Casey M. Schwab. 2012. "The Effect of Political Sensitivity and Bargaining Power on Taxes: Evidence from Federal Contractors". *American Accounting Review*, Vol. 88, No. 3, pp. 977-1005.
- Muliati, Ni Ketut. 2011. "Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan pada Praktik Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Udayana.
- Newcrest. "Syarat-Syarat dan Ketentuan Standar Penyediaan Jasa di Indonesia", Mining United, h. 1-12.
- Okezone News. 2014. "Pengertian Pemerintah", diakses pada 3 Oktober 2015 dari [http://www.Pengertian Pemerintah/Contoh Pemerintah.htm](http://www.PengertianPemerintah/ContohPemerintah.htm)
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 6 ed. Jakarta : Salemba Empat.
- Supapto, Tommy. 2010. "Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/*Public Private Partnership (PPP)* dalam Penyediaan Infrastruktur", diakses pada 21 Desember 2014 dari [http://id.scribd.com/doc/215170473/Kerjasama-Pemerintah-Dgn-Badan Usaha.PDF](http://id.scribd.com/doc/215170473/Kerjasama-Pemerintah-Dgn-BadanUsaha.PDF).
- Wahyuni, Indah Ayu Trie dan Ni Putu Santi Suryantini. 2012. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Penghematan Pajak terhadap Struktur Modal". Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- <http://www.laporankeuangan.co.id>